

Falsafah Alam Takambang Jadi Guru dalam Konstruksi Pesan Politik Tokoh Minangkabau

¹M.A. Dalmenda,²Azwar, ³M.Fedro Syafiola

¹²³Universitas Andalas

Korespondensi : dalmenda@soc.unand.ac.id

Abstrak

Krisis kepercayaan publik terhadap politisi dan urgensi internalisasi nilai lokal dalam komunikasi politik di Sumatera Barat. Tujuan penelitian adalah menganalisis penggunaan falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" sebagai basis konstruksi pesan politik tokoh Minangkabau di wilayah Solok. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi komunikasi, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh politik dan pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh politik menggunakan metafora alam dan prinsip musyawarah untuk membangun kedekatan emosional serta legitimasi kultural. Strategi ini menciptakan "Legitimasi Hibrida," di mana otoritas demokrasi formal diperkuat oleh pengakuan nilai adat. Pesan politik yang berakar pada kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam memitigasi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibandingkan retorika universal. Simpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi falsafah alam ke dalam narasi politik bukan sekadar strategi elektoral, melainkan instrumen kontrol etis yang mengembalikan politik pada nilai-nilai komunal. Keberhasilan kepemimpinan di era modern sangat bergantung pada kemampuan aktor politik dalam menyelaraskan modernitas dengan autentisitas budaya lokal.

Kata kunci : Alam Takambang Jadi Guru, Komunikasi Politik, Minangkabau.

Abstract

The crisis of public confidence in politicians and the urgency of internalizing local values in political communication in West Sumatra. The purpose of the study was to analyze the use of the philosophy of "Alam Takambang Jadi Guru" as the basis for the construction of political messages of Minangkabau figures in the Solok region. The method used is descriptive qualitative with ethnographic approach to communication, involving in-depth interviews with political figures and Indigenous stakeholders. The results showed that political figures used natural metaphors and the principle of deliberation to build emotional closeness and cultural legitimacy. This strategy creates "hybrid legitimacy," in which formal democratic authority is reinforced by recognition of Indigenous values. Political messages rooted in local wisdom have been shown to be more effective in mitigating conflict and increasing community participation than universal rhetoric. The conclusion of the study confirms that the integration of natural philosophy into the political narrative is not just an electoral strategy, but an instrument of ethical control that returns politics to communal values. The success of leadership in the modern era is highly dependent on the ability of political actors in aligning modernity with the authenticity of local culture.

Keyword: Nature as a Teacher, Political Communication, Minangkabau

1. PENDAHULUAN

Berangkat dari meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap politisi di Indonesia, kebutuhan untuk merumuskan pesan politik tokoh Minangkabau yang bertumpu pada falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" menjadi kian mendesak. Laporan Edelman Trust Barometer 2024 menunjukkan tekanan terhadap kepercayaan pada pemerintah secara global, sementara rilis Indikator Politik Indonesia berulang kali menempatkan partai politik dan lembaga legislatif pada posisi terbawah dalam tingkat kepercayaan publik. Fenomena ini merupakan indikasi bahwa bahasa dan perilaku politik kini dipersepsi jauh dari nilai-nilai

yang diharapkan masyarakat. Mengintegrasikan kearifan lokal Minangkabau ke dalam komunikasi politik menawarkan jalur pemulihan kepercayaan berbasis nilai, pengalaman kolektif, dan etika komunal (Edelman, 2024; Indikator Politik Indonesia, 2023).

Falsafah “Alam Takambang Jadi Guru”, yang dikaji secara komprehensif oleh A.A. Navis, memandang alam bukan sekadar ruang hidup, melainkan sumber pengetahuan, etika, dan tata nilai yang menuntun laku bermasyarakat. Di dalamnya tersusun mamangan, pepatah-petitih, dan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang membingkai tindakan sosial dan politik. Menghadirkan falsafah ini ke ruang politik kontemporer bukanlah bentuk romantisasi tradisi, melainkan strategi epistemologis untuk mengembalikan politik pada akar pengalaman kolektif dan orientasi moral publik (Navis, 1984).

Sejarah sosial Minangkabau memperlihatkan kemampuan tradisi untuk bernegosiasi dengan perubahan, termasuk arus Islamisasi dan modernitas. Taufik Abdullah (1966, 1981) menunjukkan bagaimana tegangan antara adat, Islam, dan elite terdidik Barat memunculkan dinamika pembaruan yang membentuk konfigurasi nilai publik yang khas. Hal ini sangat relevan bagi politik hari ini: bahwa pesan politik yang kuat lahir dari kemampuan merajut nilai-nilai (adat, agama, dan modernitas) menjadi sebuah narasi yang inklusif.

Pada aras struktur sosial, Tsuyoshi Kato (1982) menegaskan resiliensi matriline Minangkabau melalui praktik merantau yang menciptakan jembatan antara wilayah darek (pedalaman) dan rantau. Kerangka ini membuka ruang bagi tokoh politik Minangkabau untuk mengartikulasikan pesan yang menghubungkan akar komunitas dengan jejaring nasional mengolah pengalaman migrasi sebagai modal sosial, ekonomi, dan politik yang berkarakter adaptif, kolaboratif, serta berorientasi pada kesejahteraan.

Dalam lanskap politik Indonesia mutakhir, penguatan politik identitas kerap terjebak pada penggunaan simbol budaya yang superfisial dan eksklusif. Vedi R. Hadiz (2016, 2018) mengurai bagaimana populisme identitas beroperasi sebagai aliansi lintas kelas yang bersaing memonopoli representasi “umat”, namun sering kali gagal membangun koalisi produktif yang berkelanjutan. Menghadirkan falsafah Minangkabau sebagai bingkai nilai (value frame) dapat mencegah reduksi identitas menjadi sekadar simbol kosong, karena falsafah tersebut menuntut praksis etis yang teruji dalam kehidupan sehari-hari.

Di saat yang sama, studi Marcus Mietzner (2020) menunjukkan bagaimana inovasi otoritarian dan mobilisasi identitas mempersempit kompetisi elektoral serta mendorong iliberalisme eksekutif. Celah komunikasi politik di sini adalah ketiadaan narasi yang menautkan gagasan kebijakan pada horizon nilai publik. Falsafah “Alam Takambang Jadi Guru” memberikan kerangka normatif yang menekankan pada kecukupan bukti, kemaslahatan bersama, dan akuntabilitas. Hal ini mendorong politisi untuk merancang pesan berbasis pengalaman, data, dan empati komunitas.

Kesenjangan kajian komunikasi politik yang didominasi oleh teori-teori Barat menambah urgensi penelitian ini. Denis McQuail (2010) dan Brian McNair (2017) menyediakan perangkat konseptual tentang relasi media, opini publik, dan demokrasi, namun penerapannya sering kali tidak mempertimbangkan ekologi budaya lokal dan etika komunikatif komunitas tertentu. Mengkaji ulang kerangka tersebut melalui lensa Minangkabau memungkinkan adanya pengayaan teori—misalnya, menempatkan pepatah-petitih sebagai sumber daya komunikatif (communicative resources) dan musyawarah nagari sebagai praktik deliberatif yang membentuk kredibilitas serta kepercayaan.

Sebagai pijakan empiris, revitalisasi “Alam Takambang Jadi Guru” dalam budaya berbahasa dan pendidikan telah ditunjukkan oleh penelitian kontemporer (Yuniseffendri, 2016; Satria & Sahayu, 2022). Penggunaan metafora berbasis alam terbukti memperkuat kedekatan simbolik masyarakat dengan nilai-nilai etis. Bukti ini mempertegas bahwa ketika politisi menuturkan gagasan melalui bahasa dan nilai yang berakar pada lokalitas, peluang untuk memulihkan kepercayaan publik akan meningkat sebab pesan politik tidak lagi tampil sebagai retorika kosong, melainkan janji yang dapat diverifikasi oleh logika kehidupan komunitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya makna falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" dalam pesan politik tokoh Minangkabau. Studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri konteks budaya, nilai, dan praktik komunikasi politik secara komprehensif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif berorientasi pada makna, bersifat naturalistik, dan menekankan kedalaman data daripada generalisasi.

Lokasi penelitian berada di Sumatera Barat, dengan fokus pada tokoh politik Minangkabau yang aktif di ruang publik. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, meliputi tokoh politik, akademisi budaya, dan masyarakat yang memahami falsafah adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (pidato, tulisan, media sosial). Menurut Afrizal (2014), wawancara mendalam dalam penelitian kualitatif bertujuan menggali informasi yang kaya dan mendalam, sedangkan observasi dan dokumen digunakan untuk memperkuat validitas data.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi makna sesuai konteks budaya Minangkabau. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan member check kepada informan. Peneliti juga menerapkan reflektivitas untuk meminimalkan bias. Menurut Moleong (2017), analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, dengan fokus pada pemaknaan fenomena.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Falsafah Alam dalam Kepemimpinan Politik Lokal

Falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" di wilayah Solok tidak sekadar menjadi jargon budaya, melainkan telah bertransformasi menjadi basis epistemologi dalam merumuskan pesan dan praktik kepemimpinan politik. Data lapangan menunjukkan bahwa para tokoh politik di Kota dan Kabupaten Solok mengadopsi prinsip-prinsip alam ke dalam gaya kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan mereka.

A. Alam sebagai Basis Etika dan Analogi Kepemimpinan

Dalam praktiknya, kepemimpinan dianalogikan dengan fungsi-fungsi elemen alam yang stabil dan memberikan manfaat. Pemimpin diharapkan memiliki karakteristik seperti bumi yang menopang kehidupan atau air yang memberikan kejernihan dan keadilan. Hal ini menunjukkan upaya para tokoh politik untuk mengaitkan legitimasi mereka dengan nilai-nilai yang telah mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Minangkabau.

Terkait hal ini, Gusmal (Pemangku Adat) memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana alam memberikan pelajaran moral bagi seorang pemimpin:

"Kalau pemimpin itu ibarat bumi, harus kuat menopang, jangan goyah. Alam mengajarkan kita sabar dan adil. Jadi kalau ada pemimpin yang cuma mengejar kepentingan pribadi, itu jelas jauh dari falsafah kita."

Penjelasan di atas menegaskan bahwa alam berfungsi sebagai standar normatif. Pemimpin yang tidak mampu "menopang" kepentingan masyarakat atau bertindak tidak adil dianggap telah menyimpang dari hakikat kepemimpinan Minangkabau yang berlandaskan falsafah alam.

B. Komunikasi Retoris-Metaforis dan Kedekatan Emosional

Penerapan falsafah ini juga terlihat sangat kuat dalam gaya komunikasi retorik para tokoh politik. Mereka cenderung menggunakan metafora alam untuk menyederhanakan gagasan politik yang rumit agar

lebih mudah diterima oleh konstituen. Penggunaan istilah-istilah lokal seperti Luhak nan Tigo, konsep Lubuak, dan Rantau bukan sekadar penghias pidato, melainkan strategi untuk membangun kedekatan emosional.

Pesan politik yang disampaikan melalui bahasa simbolik ini terbukti lebih persuasif karena resonan dengan worldview masyarakat setempat. Dengan menggunakan bahasa yang akrab di telinga masyarakat, para politisi berhasil memposisikan diri sebagai bagian dari komunitas, bukan sosok asing yang membawa ideologi luar.

C. Kebijakan Publik yang Berakar pada Kearifan Lokal

Selain pada aspek komunikasi, penerapan falsafah ini merambah hingga ke ranah kebijakan teknis. Perencanaan kebijakan di wilayah Solok, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang nagari, sering kali diwarnai oleh pertimbangan kearifan lokal.

Sebagai contoh, kebijakan agraris dan pembangunan di Kabupaten Solok dirancang dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta tradisi musyawarah nagari. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang "belajar dari alam" yakni kebijakan yang selaras dengan lingkungan fisik dan struktur sosial masyarakatnya.

Terlihat bahwa tokoh politik di Solok telah berhasil melakukan internalisasi nilai Alam Takambang Jadi Guru. Penggunaan metafora alam dan prinsip-prinsip ekologis dalam kepemimpinan menciptakan apa yang disebut sebagai legitimasi kultural. Pemimpin tidak hanya dipercaya karena memenangkan pemilu secara formal, tetapi juga karena mereka dianggap mampu merepresentasikan nilai-nilai luhur adat dalam tindakan nyata.

D. Sinkronisasi Kepemimpinan Modern dan Otoritas Tradisional

Proses internalisasi falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" di Solok juga memicu terjadinya hibridasi antara sistem birokrasi formal dengan struktur otoritas tradisional. Para tokoh politik di wilayah ini menyadari bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga oleh pengakuan dari lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam konteks ini, alam menjadi jembatan komunikasi; pemimpin politik memposisikan diri sebagai "pohon yang rimbun" tempat berlindung, sekaligus sebagai administrator yang tunduk pada hukum positif. Strategi ini menciptakan keseimbangan kekuasaan yang harmonis, di mana program pemerintah daerah sering kali mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat karena disampaikan melalui struktur kultural yang sudah ada sejak lama.

Kekuatan dari sinkronisasi ini terletak pada kemampuan aktor politik untuk mengartikulasikan isu-isu pembangunan global ke dalam dialektika lokal yang akrab. Misalnya, saat membicarakan masalah ketahanan pangan atau mitigasi bencana, tokoh politik di Solok sering kali merujuk pada kearifan leluhur mengenai cara alam bekerja. Hal ini mencegah terjadinya penolakan masyarakat terhadap inovasi baru karena gagasan tersebut dibungkus dalam narasi kearifan lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik bukan lagi soal pertarungan kekuasaan yang kering, melainkan sebuah proses belajar kolektif di mana pemimpin dan rakyat sama-sama "berguru" pada ekosistem sosial dan alam yang mereka huni.

Terkait dinamika penggabungan nilai adat ke dalam praktik politik praktis ini, seorang tokoh masyarakat Solok, H. Rusli, memberikan pandangan kritis mengenai bagaimana seharusnya seorang pemimpin memposisikan dirinya di hadapan masyarakat:

"Pemimpin yang baik di Solok itu harus seperti akar; tidak terlihat tapi dia yang paling kuat menahan beban. Dia harus paham bahwa kekuasaan itu titipan alam dan masyarakat, maka bicaranya harus pakai bahasa hati dan adat. Kalau sudah sombong dan lupa daratan, berarti dia tidak lagi berguru pada alam."

Pendapat H. Rusli di atas memberikan dimensi baru dalam pemaknaan falsafah alam, yakni pada aspek kerendahan hati (humility) dan akuntabilitas. Metafora "akar" menggambarkan bahwa esensi kepemimpinan sejati di Minangkabau adalah pengabdian yang tidak menonjolkan diri secara berlebihan

(*low profile*), namun memiliki pengaruh yang sangat mendasar dalam menjaga stabilitas komunitas. Penjelasan ini menekankan bahwa kegagalan seorang politisi dalam menjaga etika komunikasi dan perilaku sosialnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap falsafah alam itu sendiri. Dengan demikian, "Alam Takambang Jadi Guru" berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memaksa politisi untuk tetap berada dalam koridor moralitas adat agar tidak "lupa daratan" atau menyalahgunakan kekuasaannya.

2. Konstruksi Pesan Politik Berbasis Nilai Lokal Solok

Konstruksi pesan politik tokoh-tokoh di wilayah Solok dilakukan melalui sinkronisasi antara mekanisme demokrasi modern dengan sistem nilai tradisional Minangkabau. Pesan politik sengaja dibingkai agar tidak terkesan sebagai narasi yang "diimpor" dari luar, melainkan tumbuh dari realitas sosial masyarakat Solok itu sendiri. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan narasi lokal terkait kepahlawanan, prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), serta pentingnya persatuan di tingkat nagari. Dengan strategi ini, visi dan misi politik yang disampaikan menjadi lebih resonan dengan kesadaran kolektif masyarakat setempat.

Pemanfaatan forum-forum adat, seperti rapat di Balai Adat atau musyawarah nagari, menjadi media komunikasi politik yang sangat efektif di samping penggunaan media massa modern. Dalam ruang-ruang tradisional ini, tokoh politik tidak hanya memaparkan program kerja, tetapi juga melakukan proses negosiasi nilai untuk mendapatkan legitimasi kultural. Penekanan pada semangat mufakat dalam setiap pesan yang disampaikan bertujuan untuk menjembatani prosedur demokrasi formal dengan kearifan lokal, sehingga masyarakat melihat partisipasi politik sebagai wujud pengabdian terhadap nilai-nilai komunal yang luhur.

Namun, tantangan muncul seiring dengan perubahan pola komunikasi, terutama di kalangan generasi muda yang lebih kritis dan terpapar teknologi digital. Tokoh politik dituntut untuk tidak hanya mampu berpidato di forum adat, tetapi juga harus menunjukkan konsistensi antara nilai yang mereka bicarakan dengan perilaku yang terekam di ruang publik digital. Dalam konteks perubahan zaman ini, **Fauzi Rusli** selaku pemangku adat dan Ketua DPRD Kota Solok menekankan pentingnya strategi komunikasi yang adaptif:

"Kalau kita bicara politik berbasis adat, jangan lupa generasi muda. Mereka tidak lagi hanya mendengar pidato, mereka melihat konsistensi di media sosial."

Pernyataan Fauzi Rusli tersebut menggarisbawahi bahwa efektivitas pesan politik berbasis adat saat ini bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengintegrasikan nilai tradisional dengan media modern. Bagi generasi muda, otentisitas seorang tokoh politik diukur melalui keselarasan antara narasi kearifan lokal yang disampaikan secara lisan dengan tindakan nyata yang ditampilkan di platform digital. Hal ini menuntut adanya strategi komunikasi *hybrid*, di mana nilai-nilai seperti musyawarah dan kebersamaan tidak hanya menjadi jargon dalam pidato adat, tetapi juga menjadi ruh dalam konten digital yang informatif dan transparan.

3. Dinamika Spasial dan Internalisasi Nilai Musyawarah

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan dalam penerapan falsafah antara wilayah urban di Kota Solok dan wilayah rural di Kabupaten Solok. Di Kota Solok, penerapan falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" cenderung bersifat simbolik dan digunakan sebagai penguat identitas politik di tengah arus modernisasi yang kuat. Sebaliknya, di Kabupaten Solok, nilai-nilai tersebut masih terintegrasi secara mendalam dalam struktur sosial dan proses pengambilan keputusan di tingkat Nagari, di mana tokoh lokal berfungsi sebagai penerjemah nilai bagi generasi muda dan arena politik modern.

Salah satu inti dari penerapan falsafah ini adalah internalisasi nilai musyawarah dalam praktik kebijakan publik. Musyawarah di Solok bukan sekadar aktivitas seremonial atau ritual duduk bersama di

Balai Adat, melainkan sebuah kerangka berpikir yang harus melandasi setiap kebijakan pemerintah agar tercipta keadilan yang inklusif. Ketika semangat mufakat ini hilang dari proses pengambilan keputusan, maka kepemimpinan tersebut dianggap telah kehilangan esensi keminangkabauannya, yang berpotensi menggerus legitimasi kultural di mata masyarakat.

Mengenai pentingnya internalisasi semangat mufakat ini, Dt. Marah Baganti memberikan pandangan yang sangat mendasar:

“Musyawarah itu bukan hanya duduk di balai adat, tapi juga cara berpikir. Kalau pemimpin tidak membawa semangat mufakat ke kebijakan, itu bukan Minangkabau.”

Di sisi lain, H. Rusli (Ketua LKAM Kota Solok) memberikan penekanan pada aspek autentisitas penggunaan adat agar tidak hanya menjadi komoditas politik:

“Kalau adat kita cuma jadi hiasan di panggung politik, itu bahaya. Adat harus jadi pedoman, bukan sekadar dekorasi.”

Adat harus jadi pedoman, bukan sekadar dekorasi” menegaskan kritik terhadap praktik politik identitas yang dangkal. Ketika adat hanya digunakan sebagai simbol atau ornamen untuk menarik simpati, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya kehilangan makna substantif. Dalam konteks Minangkabau, falsafah “Alam Takambang Jadi Guru” bukan sekadar slogan, melainkan panduan etis yang mengatur hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan. Jika politisi hanya memanfaatkan adat untuk kepentingan elektoral tanpa menginternalisasi prinsipnya, maka politik akan terjebak pada retorika kosong yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

Sebaliknya, menjadikan adat sebagai pedoman berarti mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi politik. Prinsip musyawarah, keadilan, dan keseimbangan yang terkandung dalam adat Minangkabau dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, politisi tidak hanya tampil sebagai representasi budaya, tetapi juga sebagai agen moral yang menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata. Pendekatan ini bukan sekadar memperkuat identitas, tetapi juga membangun legitimasi politik yang berakar pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan konsistensi pemimpin.

4. Internalisasi Nilai dan Implikasi Praktis Musyawarah

Dalam konteks kepemimpinan di Kabupaten Solok, Pak Gusmal menekankan bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur formal untuk mencapai kesepakatan, melainkan instrumen untuk memitigasi konflik sosial yang mungkin timbul akibat kebijakan pembangunan. Menurutnya, kegagalan pemimpin dalam melibatkan unsur “Tigo Tungku Sajarangan” (Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai) dalam setiap pengambilan keputusan strategis akan berdampak pada resistensi masyarakat di tingkat akar rumput. Terkait hal ini, beliau menyatakan:

“Kepemimpinan itu ibarat mengayuh sampan di tengah arus; jika tidak seia sekata antara pendayung dan kemudi melalui musyawarah, maka sampan akan karam. Kebijakan yang lahir tanpa mufakat adalah kebijakan yang buta akan realitas sosial rakyatnya.”

Validitas sebuah pesan politik sangat bergantung pada proses hulu, yaitu musyawarah. Secara teoretis, ini menunjukkan bahwa komunikasi politik di Solok tidak bersifat *top-down*, melainkan bersifat deliberatif. Pemimpin yang mengabaikan mufakat akan menghadapi kendala dalam tahap implementasi kebijakan, karena masyarakat Minangkabau cenderung patuh pada aturan yang mereka merasa ikut serta dalam merumuskannya. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai jaminan stabilitas politik dan sosial yang berbasis pada rasa memiliki (*sense of belonging*) komunitas terhadap arah pembangunan daerah.

Sementara itu, Mak Marah Baganti menyoroti dimensi epistemologis dari musyawarah sebagai proses pembelajaran dari alam untuk menjaga keseimbangan. Beliau memandang bahwa esensi dari “Alam Takambang Jadi Guru” dalam politik adalah kemampuan pemimpin untuk menangkap aspirasi yang tidak terucap melalui pengamatan mendalam terhadap kondisi lingkungan dan kebatinan rakyatnya. Musyawarah

dianggap sebagai ruang di mana "kebenaran alam" disaring menjadi keputusan manusiawi yang adil. Beliau memberikan penekanan sebagai berikut:

"Alam mengajarkan kita tentang porsi; matahari menyinari, hujan membasahi. Begitu juga musyawarah, ia adalah cara kita menimbang porsi keadilan agar tidak ada nagari yang merasa ditinggalkan dan tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh ego penguasa."

Implikasi pada pentingnya Keadilan Distributif dalam pesan politik. Musyawarah bertransformasi dari sekadar metode diskusi menjadi sistem distribusi sumber daya yang berbasis etika alam. Bagi para politisi, hal ini berarti bahwa setiap janji politik dan narasi kampanye harus mampu mencerminkan keseimbangan kepentingan antarnagari. Jika pesan politik hanya menguntungkan satu kelompok atau wilayah tertentu, maka politisi tersebut dianggap gagal memahami filosofi alam yang selalu bergerak menuju keseimbangan (*equilibrium*). Implikasi praktisnya, tokoh politik di Solok dituntut untuk memiliki kepekaan spasial dan sosial yang tinggi agar narasi politik mereka tetap dianggap relevan dan berwibawa di mata publik.

Secara kolektif, pandangan kedua tokoh ini menunjukkan bahwa musyawarah dan internalisasi nilai alam memiliki implikasi terhadap pembentukan Kredibilitas Kepemimpinan yang berjangka panjang. Komunikasi politik yang hanya bersifat kosmetik atau menggunakan simbol adat tanpa mempraktikkan semangat musyawarah akan mudah terdeteksi oleh masyarakat sebagai bentuk "pendangkalan budaya". Oleh karena itu, integritas seorang tokoh politik di Solok diuji melalui konsistensi antara retorika adat yang disampaikan di podium dengan keterbukaan mereka dalam ruang-ruang musyawarah yang sesungguhnya. Hal ini mempertegas bahwa politik berbasis kearifan lokal di Minangkabau memerlukan keterlibatan moral yang utuh, bukan sekadar strategi pencitraan untuk memenangkan suara dalam kontestasi elektoral.

Implikasi Teori

Konsep Legitimasi Hibrida (*hybrid legitimacy*) muncul sebagai pengembangan signifikan terhadap teori legitimasi politik konvensional, di mana otoritas pemimpin di masyarakat berbudaya kuat tidak lagi hanya bersumber dari legalitas formal atau prosedur demokratis semata. Dalam konteks Minangkabau, legitimasi ini merupakan perpaduan antara aspek prosedural melalui pemilihan umum dan aspek substantif melalui pengakuan adat serta internalisasi falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" dalam perilaku kepemimpinan. Teori ini mengimplikasikan bahwa stabilitas kekuasaan di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan aktor politik untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan pemenuhan ekspektasi kultural masyarakatnya.

Secara epistemologis, falsafah "Alam Takambang Jadi Guru" menggeser paradigma komunikasi politik dari sekadar penyampaian informasi satu arah menjadi sebuah kerangka kerja yang hidup (*living framework*) yang membentuk cara pandang politisi terhadap dinamika sosial. Metafora alam yang digunakan dalam komunikasi politik bukan sekadar ornamen bahasa, melainkan instrumen untuk menerjemahkan kebijakan modern ke dalam bahasa simbolik yang memiliki resonansi emosional dan memori kolektif. Hal ini memperkaya teori komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa efektivitas pesan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau strategi pemasaran, tetapi oleh kedalaman akar pesan tersebut dalam *worldview* atau cara pandang dunia konstituennya.

Hal ini menekankan teori deliberasi melalui revitalisasi musyawarah mufakat sebagai mekanisme kontrol sosial dan *filter* etis dalam pengambilan keputusan. Musyawarah ditransformasikan dari ritual tradisional menjadi praktik deliberatif yang memastikan kebijakan selaras dengan prinsip keadilan alam dan kemaslahatan bersama. Implikasi teoretisnya adalah bahwa demokrasi lokal yang sehat memerlukan integrasi antara institusi formal dengan lembaga adat sebagai mitra strategis, guna mencegah "tradisionalisasi superfisial" atau penggunaan simbol adat tanpa makna yang justru dapat mengikis kepercayaan publik.

4. KESIMPULAN

Falsafah “*Alam Takambang Jadi Guru*” tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi telah menjadi kerangka epistemologis dalam konstruksi pesan politik tokoh Minangkabau. Penerapan falsafah ini terlihat dalam gaya komunikasi retorik-metaforis, kebijakan publik yang berakar pada kearifan lokal, serta sinkronisasi antara kepemimpinan modern dan otoritas tradisional. Nilai musyawarah dan prinsip keseimbangan alam menjadi instrumen kontrol sosial yang memastikan legitimasi politik berbasis budaya tetap terjaga. Dengan demikian, politik Minangkabau yang mengintegrasikan falsafah alam mampu menciptakan legitimasi hibrida yang menggabungkan prosedur demokratis dengan pengakuan adat, sekaligus memperkaya teori komunikasi politik melalui pendekatan kontekstual yang berakar pada worldview masyarakat.

5. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi para aktor politik Minangkabau, integrasi falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* hendaknya tidak berhenti pada tataran simbolik atau retorika kampanye, melainkan diwujudkan secara konsisten dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta praktik komunikasi politik sehari-hari, baik di ruang adat maupun ruang publik digital. Konsistensi antara narasi nilai dan tindakan politik menjadi prasyarat utama untuk menjaga legitimasi kultural dan kepercayaan publik. Kedua, bagi pemerintah daerah dan lembaga adat, diperlukan penguatan mekanisme kolaboratif khususnya melalui revitalisasi musyawarah nagari—sebagai ruang deliberatif yang inklusif, sehingga kebijakan publik dapat disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis, keadilan distributif, dan aspirasi lintas generasi. Ketiga, bagi kalangan akademisi, penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan dengan pendekatan komparatif antarwilayah atau dengan fokus pada transformasi nilai adat dalam ekosistem komunikasi digital, guna memperkaya pengembangan teori komunikasi politik berbasis kearifan lokal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan data kuantitatif agar dampak penggunaan nilai lokal dalam komunikasi politik dapat diukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. *Indonesia*, (2), 1–24.
- [2] Abdullah, T. (1981). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- [3] Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. RajaGrafindo Persada.
- [4] Edelman. (2024). *Edelman trust barometer 2024*. Edelman.
- [5] Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- [6] Hadiz, V. R. (2018). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah* (Edisi Bahasa Indonesia). Pustaka Alvabet.
- [7] Indikator Politik Indonesia. (2023). *Rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia 2023*.
- [8] Kato, T. (1982). *Matriliney and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- [9] McNair, B. (2017). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.

- [10] McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- [11] Mietzner, M. (2020). *Authoritarian innovations and democratic decline: Indonesia in comparative perspective*. Routledge.
- [12] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- [13] Navis, A. A. (1984). *Alam takambang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- [14] Satria, A., & Sahayu, W. (2022). Metafora berbasis alam dalam ungkapan tradisional Minangkabau. *Jurnal Budaya* .
- [15] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [16] Yuniseffendri. (2016). Revitalisasi nilai-nilai falsafah alam takambang jadi guru dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan*